

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT* DAN TATA KELOLA PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT**

Wulan Hervina Destriana<sup>1</sup>, Yogi Suprayogi Sugandi<sup>2</sup>, Ginanjar Wira Saputra<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung<sup>1,3</sup>, Universitas Padjadjaran<sup>2</sup>  
yogi.suprayogi@unpad.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan *E-Government* terhadap kinerja pegawai, mengetahui pengaruh tata kelola pemerintah terhadap kinerja pegawai serta mengetahui pengaruh implementasi kebijakan *E-Government* dan tata kelola pemerintah terhadap kinerja pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Garut. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif. Dengan jumlah populasi sebanyak 114 dan jumlah sampel 54. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan metode sampel jenuh sehingga jumlah sampel sama dengan total populasi. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan *E-Government* Dan Tata Kelola Pemerintah secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai, dengan kontribusi besarnya pengaruh sebesar 72,6%. Simpulan, ada pengaruh yang signifikan antara implementasi kebijakan *E-Government* Tata Kelola Pemerintah terhadap Kinerja Pegawai.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan *E-Government*, Kinerja Pegawai, Tata Kelola Pemerintah,

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the effect of implementing E-Government policies on team member performance, the impact of government governance on team member performance, and the effect of implementing E-Government policies and government governance on the performance of Garut district population and civil registration service employees. This research method is quantitative. With a population of 54 people, the total number of employees is the Garut Regency Population and Civil Registration Service. The research sampling method uses a saturated sample method so that the number of samples is the same as the total population. Data analysis uses multiple linear regression analysis. The research results show that implementing e-government policies and government governance partially and simultaneously influences team member performance, with a contribution of 72.6%. In conclusion, there is a significant influence between the implementation of E-Government Government Governance policies on team member performance.*

*Keywords: Implementation of E-Government Policy, Employee Performance, Government Governance*

**PENDAHULUAN**

Dibawah perkembangan teknologi dan ilmiah, dunia telah melihat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan penyebaran internet, yang membantu masuknya dunia ke era informasi untuk menumbuhkan minat organisasi dari

semua jenis dan melakukan perkembangan kinerja organisasi melalui peningkatan kreativitas, inovasi, serta kepuasan publik. Sehingga perkembangan teknologi yang memberikan kontribusi pada penyederhanaan proses pelayanan publik yang bertujuan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai. Dalam pengertian ini pemerintah menyadari pentingnya transisi *e-work* menuju penerapan yang disebut (*E-Government*) (Azzahra, 2016; Dzauharoh & Saputra, 2023). Oleh sebab itu adanya tuntutan pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan bersama, dan terfasilitasinya partisipasi masyarakat terhadap proses kebijakan pemerintah, serta efektivitas kerja pemerintah menjadi sangat penting dan butuh perhatian. Karena pada kenyataannya kualitas pelayanan publik masih butuh perbaikan dan peningkatan dalam kualitas pelayanannya. Salah satu bentuk perubahan yang harus dilakukan yaitu terkait penerapan sebuah sistem informasi untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan tuntutan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya sebuah sistem informasi yang diterapkan di instansi pemerintah, maka masyarakat akan dengan mudah mengakses informasi terkait dengan kegiatan pelayanan yang diberikan pemerintah seperti informasi kebijakan pemerintah, program yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Hal ini menjadi pendorong pelaksanaan penerapan *electronic government (e-gov)* sebagai sistem yang memanfaatkan teknologi informasi di pemerintahan (Heryana & Dewi, 2013).

Dalam instruksi Presiden no 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-governmenet* diinstruksikan kepada seluruh entitas pemerintahan yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya guna terlaksananya pengembangan *E-Government* secara nasional. maka selain pemerintah pusat, semua pemerintah daerah juga ikut memberikan pelayanan perijinan yang lebih transparan dengan menerapkan sistem *E-Government* tersebut (Presiden, 2003). Begitu pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, turut menerapkan sistem penerapan *E-Government*. Adapun penerapan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut adalah sebuah indikator yang dicapai dalam urusan komunikasi dan informatika yaitu adanya kepemilikan website Pandu *Online* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut mengarah pada pelayanan dalam bentuk administrasi kependudukan sebagai pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan mudah, pada saat ini aspek pelayanan tersebut sudah berjalan dengan baik. Namun perlu perbaikan secara bertahap karena dipengaruhi oleh struktur organisasi yang beberapa kali mengalami perubahan dan menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya capaian kinerja, sehingga produk kebijakan tidak dapat dihasilkan secara cepat dan maksimal. Hal ini diyakini, karena dengan kelancaran penyelenggaraan pelayanan tugas pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sangat tergantung pada kinerja pegawai. Aparatur merupakan unsur pemerintah yang langsung bertugas melayani masyarakat. Kinerja aparat yang baik dapat mendukung tugas pokok pengembangan sumber daya dan manajemen pegawai.

Penerapan *e- Government* pada pemerintahan saat ini belum berjalan dengan mulus, penggunaan sistem informasi masih belum maksimal. Lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah belum memiliki hubungan kerjasama yang sinergis (Idris & Rahim, 2022). Penerapan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dapat menciptakan suatu hasil kerja yang efektif, partisipatif, berkeadilan, demokratis, transparan dan bertanggung jawab jika ditunjang dengan sistem

aparatur negara yang modern, yang dilandasi oleh derajat rasionalitas yang tinggi. Harapan yang muncul adalah penerapan *E-Government* akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, untuk penerapannya memang tidak mudah, karena memerlukan proses dan tahapan seperti halnya meningkatkan hasil kinerja birokrasi. Penerapan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut menghadapi beberapa tantangan. Salah satu diantaranya adalah permasalahan terkait kinerja yang berhubungan dengan sistem *E-Government* yaitu permasalahan dari sumber daya manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang berahli dalam informatika dan teknologi. Hal ini disebabkan teknologi informasi dan komunikasi berubah sedemikian cepat, sehingga di perlukan kinerja pegawai yang mampu menanggapi perubahan. Adapun permasalahan internalnya yaitu; Terbatasnya kuantitas/jumlah aparatur dalam mengelola data kependudukan; Masih belum meningkatnya pemahaman aparatur terhadap ketentuan administrasi kependudukan secara dinamis; Sarana dan prasarana yang sangat terbatas; Masih adanya jaringan komunikasi data yang bermasalah.

Tabel 1  
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	REALISASI (5)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan ktp-el, KK dan Akta pencatatan sipil, KIA serta pelayanan. Pemanfaatan NIK, KTP elektronik dan data kependudukan kepada lembang penggunaan di kabupaten garut.	Pengelolaan kegiatan penyelenggaraan adminduk kabupaten/kota, meliputi : a. Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP elektronik. b. Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-17tahun. c. Penerbitan kartu identitas anak (KIA) d. Penggunaan data konsolidasi bersih untuk pelayanan. e. Penjanjian kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh OPD kabupaten Garut. f. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan	100%  97%  40%  Sudah dilaksanakan  Seluruh OPD  Tidak ada pungutan dan tidak terjadi OTT  Melaporkan ke pusat melalui provinsi	98,90%  83,17%  17,83%  Sudah dilaksanakan  7 OPD  Tidak ada pungutan dan tidak terjadi OTT  Tidak ada pelanggaran

			dokumen kependudukan.	
			g. Pelanggaran terhadap permendagri No 76 tahun 2017	
2	Capaian Keluaran/Output kinerja pelayanan dokumen lainnya	Keluaran/Output hasil pelayanan dokumen lainnya	Laporan secara lengkap hasil pelayanan Dukcapil per jenis dokumen/output	13 Buku pokok pemakaman
3	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	a. Pelayanan bidang Dafduk, Capil, dan PIAK serta pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan b. Pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi	Jenis dan jumlah inovasi Jenis dan jumlah pelayanan terintegrasi	9 jenis 9 jenis
4	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah	Melaksanakan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	Sudah dilaksanakan	Sudah

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya penataan penerbitan dokumen dan data kependudukan	1. Rasio penduduk ber KTP Persatuan penduduk 2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 3. Cakupan penerbitan KTP 4. Rasio bayi ber akta kelahiran 5. Rasio pasangan ber akta nikah 6. Cakupan penerbitan akta kelahiran 7. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi 8. Cakupan pemanfaatan data kependudukan	99,8% Sudah 99,8% 70% 55% 35% Ada 50%	72,60% Sudah 72,60% 85,62% 112,7% 251,97% Ada 18,76%	72,45% Sudah 72,45% 59,94% 62% 88,19% Ada 9,38%

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Kategori nilai hasil evaluasi sistem akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A (Memuaskan)	Baik	Baik
---	--	---	---------------	------	------

Dalam rangka pencapaian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berkualitas karena itu merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan *e-Government*. Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut berusaha meningkatkan kinerja aparaturnya dengan mendayagunakan teknologi informasi melalui suatu sistem manajemen informasi daerah yang terintegritas, cepat dan tanggap. Hal ini diyakini bahwa dengan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sangat tergantung pada kinerja pegawai. Dalam mewujudkan *good government* sangatlah menentukan sehingga secara organisasi dalam menyelenggarakan urusan kependudukan dituntut untuk profesional, sehingga diharapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki sehingga dapat lebih responsif, kreatif, dan inovatif dalam mewujudkan urusan kependudukan. Dengan senantiasa meningkatkan pelayanan yang profesional dan akurat dengan pendekatan partisipatif dan teknokratik diharapkan dapat menjawab segala tantangan serta perubahan lingkungan yang ada (Jauhari et al., 2015). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti menetapkan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : (1) Bagaimana pengaruh *E-Government* terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut (2) Bagaimana Tata Kelola Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut; (3) Bagaimana Pengaruh Penerapan *E-Government* dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

Tabel 2  
Jumlah Pegawai ( PNS dan Non PNS/TKK) berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1	Sekretariat	8	8	16
2	Bidang Pelayanan Pendaftaran	47	16	63
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	7	7	14
4	Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	13	1	14
5	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	2	5	7
Total		77	37	114

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti bertindak sebagai instrument kunci, peneliti akan secara langsung ke objek penelitian yang sudah ditentukan agar dapat melihat dan mengamati langsung fenomena fenomena yang di teliti. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tingkat keterpengaruhan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Keterpengaruhan yang dimaksud adalah menjelaskan dan menganalisis besarnya pengaruh implementasi kebijakan *E-Government* baik secara langsung, secara tidak langsung maupun secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Sehingga penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatori survey. Dalam pengumpulan data dikembangkan instrumen penelitian berupa observasi, kuesioner.

Kuesioner berisikan pernyataan untuk menjaring informasi/data yang diperlukan dalam penelitian yang ditujukan kepada responden yang terkait dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut yang secara keseluruhan berjumlah 114 orang. Untuk menentukan jumlah sampel, maka menggunakan rumus Slovin. Dari perhitungan rumus slovin tersebut diketahui bahwa jumlah sampelnya adalah 54 orang.

## HASIL PENELITIAN

### Karakteristik Responden

Tabel 3.  
Karakteristik Responden

Responden	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	30	56
Perempuan	24	44
Usia:		
18 – 28 Tahun	10	19
29 – 39 Tahun	21	39
40 – 50 Tahun	15	28
> 50 Tahun	8	15
Pendidikan:		
SMA/SMK	9	17
Diploma	13	24
D4/S1	22	41
S2	10	19
Lama Bekerja:		
1 – 5 Tahun	11	20
6 – 10 Tahun	31	57
> 10 Tahun	12	22

Karakteristik responden yang terlibat didominasi oleh karyawan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56%. Pada kategori usia, didominasi oleh kelompok usia 29 - 39 tahun sebanyak 39%. Pada kategori pendidikan, reponden yang terlibat sebanyak 41% pada tingkat pendidikan D4/S1, kemudian SMA/SMK sebanyak 17%, diikuti dengan

lulusan Diploma sebanyak 24%. Pada kategori lama kerja, didominasi oleh karyawan yang sudah bekerja selama 6 - 10 tahun sebanyak 57%.

### Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Suatu indikator atau item pernyataan dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai  $r$  hitung lebih besar dari nilai  $r$  tabel. Sedangkan pada uji reliabilitas, item pernyataan dapat dikatakan reliabel atau andal, adalah ketika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.600. Nilai  $r$  tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 0.266. Berdasarkan tabel 2 yang telah disajikan dibawah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan dapat dikatakan valid dan reliabel dalam mengukur apa yang seharusnya diukur pada waktu yang berbeda-beda.

Tabel 4.  
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

Variabel	Item	r hitung	Cronbach's Alpha
Implementasi <i>E-Government</i>	X1.1	0.770	0.811
	X1.2	0.740	
	X1.3	0.784	
	X1.4	0.794	
	X1.5	0.742	
Tata Kelola Pemerintah	X2.1	0.394	0.679
	X2.2	0.423	
	X2.3	0.636	
	X2.4	0.662	
	X2.5	0.462	
	X2.6	0.591	
	X2.7	0.407	
	X2.8	0.363	
Kinerja Pegawai	Y.1	0.763	0.923
	Y.2	0.604	
	Y.3	0.766	
	Y.4	0.855	
	Y.5	0.755	
	Y.6	0.774	
	Y.7	0.791	
	Y.8	0.750	
	Y.9	0.793	
	Y.10	0.874	

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi sempurna pada variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat terjadi apabila nilai VIF > 10. Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 5, nilai VIF untuk setiap variabel independen lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas

Tabel 5  
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Implementasi <i>E-Government</i>	0.946	1.057
Tata Kelola Pemerintah	0.946	1.057

### Uji Normalitas

Suatu uji parametrik perlu dilakukan uji normalitas untuk memastikan apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak, sebab data yang berdistribusi normal dapat mengurangi bias saat melakukan pengujian. Pada pengujian menggunakan metode Kolmogorov Smirnov, data yang berdistribusi normal memiliki nilai sig. > 0.05. Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa nilai sig. sebesar 0.080, artinya data dapat dikategorikan berdistribusi normal.

Tabel 6.  
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.59007380
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.103
	Positive	.103
	Negative	-.059
Test Statistic		.103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

### Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel Implementasi *E-Government* dan Tata Kelola Pemerintah terhadap Kinerja Pegawai. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai r square sebesar 0.726, artinya Implementasi *E-Government* dan Tata Kelola Pemerintah dapat mempengaruhi Kinerja Pegawai sebesar 72.6%.

Tabel 7.  
Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.852	0.726	0.727	1.589

### Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear digunakan untuk mengetahui arah pengaruh dari variabel Implementasi *E-Government* dan Tata Kelola Pemerintah terhadap Kinerja Pegawai. Jika nilai koefisien regresi bernilai positif, artinya variabel Implementasi *E-Government* dan Tata Kelola Pemerintah dapat meningkatkan nilai dari variabel Kinerja Pegawai.



Sebaliknya apabila koefisien regresi bernilai negatif, maka kenaikan nilai pada variabel Implementasi *E-Government* dan Tata Kelola Pemerintah dapat menurunkan nilai dari variabel Kinerja Pegawai. Pada persamaan regresi  $Y = a + bx + cx$ , diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 8  
Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Std. Error	T Statistics	Sig.
Konstanta	2.257	0.529	4.267	0.000
Implementasi <i>E-Government</i>	0.623	0.118	5.280	0.000
Tata Kelola Pemerintah	0.793	0.073	10.863	0.000

Berdasarkan tabel diatas, persamaan yang terbentuk yaitu  $Y = 2.257 + 0.623X_1 + 0.793X_2$ , artinya:

- Konstanta persamaan regresi sebesar 2.257, artinya apabila Implementasi *E-Government* dan Tata Kelola Pemerintah tidak memberikan pengaruh sama sekali atau bernilai nol, maka nilai dari kinerja pegawai adalah sebesar 2.257.
- Nilai koefisien regresi untuk Implementasi *E-Government* adalah sebesar 0.623. Nilai tersebut bersifat positif, artinya apabila Implementasi *E-Government* mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka nilai dari kinerja pegawai akan ikut naik sebesar 0.623.
- Nilai koefisien regresi untuk Tata Kelola Pemerintah adalah sebesar 0.793. Nilai tersebut bersifat positif, artinya apabila Tata Kelola Pemerintah mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka nilai dari kinerja pegawai akan ikut naik sebesar 0.793.

### Uji Hipotesis Parsial

Uji hipotesis parsial dapat menggunakan uji t sebagai dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan bahwa hipotesis dapat diterima yaitu dengan membandingkan nilai signifikansinya. Apabila suatu variabel memiliki nilai sig. < 0.05, maka hipotesis dapat diterima. Berdasarkan tabel 6 yang terdapat pada uji regresi linear berganda, diperoleh informasi bahwa:

- Nilai sig. pada variabel Implementasi *E-Government* sebesar  $0.000 < 0.05$ . Artinya Implementasi *E-Government* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. **H1 diterima.**
- Nilai sig. pada variabel Tata Kelola Pemerintah sebesar  $0.000 < 0.05$ . Artinya Tata Kelola Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. **H2 diterima.**

### Uji Hipotesis Simultan

Pengujian hipotesis simultan dapat menggunakan uji F atau uji ANOVA. Suatu hipotesis dapat diterima ketika memiliki nilai sig. < 0.05. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa nilai sig. untuk uji ini adalah 0.000 (<0.05). Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi *E-Government* dan Tata Kelola Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja pegawai secara simultan dan signifikan.

Tabel 9  
Uji ANOVA

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	389.736	2	244.868	87.017	.000 <sup>b</sup>
	Residual	31.246	51	2.524		
	Total	420.982	53			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), *E-Government*, Tata Kelola

## PEMBAHASAN

Implementasi *E-Government* dan tata kelola pemerintah yang baik dapat meningkatkan efisiensi administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual, menghindari duplikasi data, dan mempercepat diprosesnya dokumen (Koesharijadi et al., 2019). Hal ini dapat membantu pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas administratif dengan lebih cepat dan efisien. *E-Government* dapat membantu meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Dengan adanya platform online atau aplikasi yang terintegrasi, masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mudah dan cepat (Lestari, 2018) Pegawai di dinas tersebut dapat berperan sebagai penyedia informasi dan penanggung permintaan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah interaksi dengan publik (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018). Implementasi tata kelola pemerintah yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Adanya mekanisme pemantauan, evaluasi kinerja, dan sistem pengawasan yang efektif dapat mendorong pegawai untuk bekerja secara lebih bertanggung jawab dan profesional. Dalam lingkungan yang baik, pegawai cenderung lebih berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada Masyarakat (Saputra, 2018). Menurut Suarha et al., (2023), *E-Government* dan tata kelola pemerintah yang baik dapat menjadi stimulus bagi pengembangan kompetensi pegawai. Implementasi teknologi dan proses kerja yang efisien dapat memungkinkan pegawai untuk memperoleh keterampilan baru dalam penggunaan teknologi informasi. Selain itu, tata kelola pemerintah yang baik juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan profesional melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ini akan berdampak positif pada kinerja pegawai dalam menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks (Suprianto, 2014).

## Simpulan

Berdasarkan interpretasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi *E-Government* dan tata kelola pemerintah yang baik memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Penggunaan teknologi informasi, efisiensi administrasi, aksesibilitas layanan, peningkatan akuntabilitas, pengembangan kompetensi, dan peningkatan pelayanan publik adalah beberapa faktor yang dapat memperbaiki kinerja pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A. A. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Government terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di pemerintah Kota Tasikmalaya*. Universitas Widyatama. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7463>
- Dzauharoh, S., & Saputra, G. W. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Generasi Milenial di Era Modern. *Public Administration And Development Journal*, 1(1), 34–39. <https://doi.org/10.59223/padj.v1i1.10>
- Heryana, T., & Dewi, S. K. (2013). Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/6572>
- Idris, M., & Rahim, D. R. (2022). Pengaruh E-Government, Kompetensi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 3(6), 1048–1059.
- Jauhari, A., Basri, H., & Shabri, M. (2015). Penerapan Good Governanceberbasis E-government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(3). <https://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4479>
- Koesharijadi, K., Hardiyansyah, H., & Akbar, M. (2019). Implementasi Kebijakan E-Government, Komitmen, Pengembangan Aparatur Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/373>
- Lestari, V. S. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di SKPD Kabupaten Garut*. Universitas Widyatama. <https://repository.widyatama.ac.id/items/b4b2a375-2469-4a6c-b3e4-25e174f2603f>
- Presiden, R. (2003). *Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147277/inpres-no-3-tahun-2003>
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Saputra, G. W. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Bina Administrasi (JBA)*. <https://stiabandung.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/Isi-V6-N1-2.pdf>
- Suarha, C., Saputra, G. W., & Johan, A. (2023). Analisis Perencanaan Dan Pengembangan Karier Bintara Polri Satuan Brigade Mobil Daerah Jawa Barat (Studi Kasus Pada Batalyon A Pelopor). *Journal Publicuho*, 6(1), 56–70. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.91>
- Suprianto, E. (2014). Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.30659/ekobis.15.1.17-30>